

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR
TAHUN 2015**



DENPASAR 2016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Isu Strategik.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kinerja.....	13
2.3 Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Akuntabilitas Kinerja.....	33
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	41
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Simpulan.....	44
4.2 Langkah Perbaikan	44

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia, baik berupa undang-undang, instruksi presiden maupun peraturan menteri.

Secara substantif laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan khususnya Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang berupa pelaksanaan kebijakan, pencapaian sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015 yang mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar 2010-2015.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut berperan aktif dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Denpasar, 9 Februari 2016
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Gusti Rai Suta, SH
NIP. 10561231 198102 1 044

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yg baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yg setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2015 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar melalui indikator sasaran dan kegiatan.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar, pada tahun 2015 ini ditetapkan sasaran dengan 17 indikator sasaran.

Pengukuran kinerja yang kami lakukan bukan hanya semata-mata dari sisi pertanggungjawaban keuangan saja, melainkan juga pengukuran terhadap hasil atau manfaat.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan diperoleh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar dengan rata-rata tingkat capaian dikategorikan baik.

Kinerja ini tidak luput dari kendala atau hambatan yang dihadapi. Pada tahun-tahun mendatang telah diupayakan strategi-strategi untuk memperoleh hasil capaian kinerja yang semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Guna mewujudkan maksud di atas, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Tahun 2015 yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Nomor 36 Tahun Anggaran 2015

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015 mengacu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 yang memuat visi – misi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2015.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2015 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan

tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

1.4 Isu Strategik

Dalam pelaksanaan undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintah adalah walikota dan perangkat daerah / sebagai unsur eksekutif dan DPRD sebagai unsur legislatif. Disamping itu dengan menguatnya tuntutan tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD diuntut untuk berinovatif dan produktif dalam membuat regulasi dan melaksanakan fungsi anggaran agar efektif dan efisien serta melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan, cepatnya perubahan regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan kurangnya sosialisasi di daerah-daerah, berdampak pada mis pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus dilaksanakan dalam merancang Perda penyelenggara kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD, disatu sisi pimpinan dan anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan professional dan kreatif..

Dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD diawali oleh rapat Badan Musyawarah dalam menyusun jadwal kunjungan kerja keluar daerah guna memperoleh bahan, masukan atau perbandingan dalam pembahasan Ranperda baik yang diajukan oleh Eksekutif maupun Ranperda inisiatip Dewan.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli fraksi dan kelompok ahli sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Penentuan tenaga ahli maupun kelompok ahli merupakan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai tata tertib DPRD Kota Denpasar.

Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pada Sekretariat DPRD kota Denpasar, yang harus dicapai adalah

1. Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) melalui penegakan supremasi hukum DPRD sesuai misi yang diemban dituntut inovatif dan produktif menghasilkan peraturan daerah.
2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk memperlancar tugas-tugas.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

1.5 Struktur Organisasi dan gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

1.5.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Denpasar, maka Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar terdiri dari: Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon IIB, 3 (tiga) Kepala Bagian yang dijabat oleh pejabat eselon IIIA yaitu Kabag Umum, Kabag Keuangan dan Kabag Perundang-undangan dengan 9 (sembilan) Kasubag pejabat eselon IVA, yaitu: Kasubag Tata Usaha, Kasubag Rumah Tangga, Kasubag Humas dan Protokol, Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Perbendaharaan, Kasubag Pelaporan, Kasubag Perundang-Undangan, Kasubag Risalah, Persidangan dan Rapat serta Kasubag Kerjasama dan Fasilitasi, sesuai yang telah terurai diatas :

Sumber daya aparatur berjumlah 57 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 3 orang non PNS, yang terdiri dari 13 orang pejabat struktural, dan 45 orang fungsional umum/staf administrasi dan THL 3 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan 3 orang S-2, 21 orang S-1, dan 2 orang Diploma3, 20 orang SMA, 1 orang SD. Dan tenaga kontrak 42 orang.

1.5.2 Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Secara Internal Sekretaris DPRD Kota Denpasar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Denpasar melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

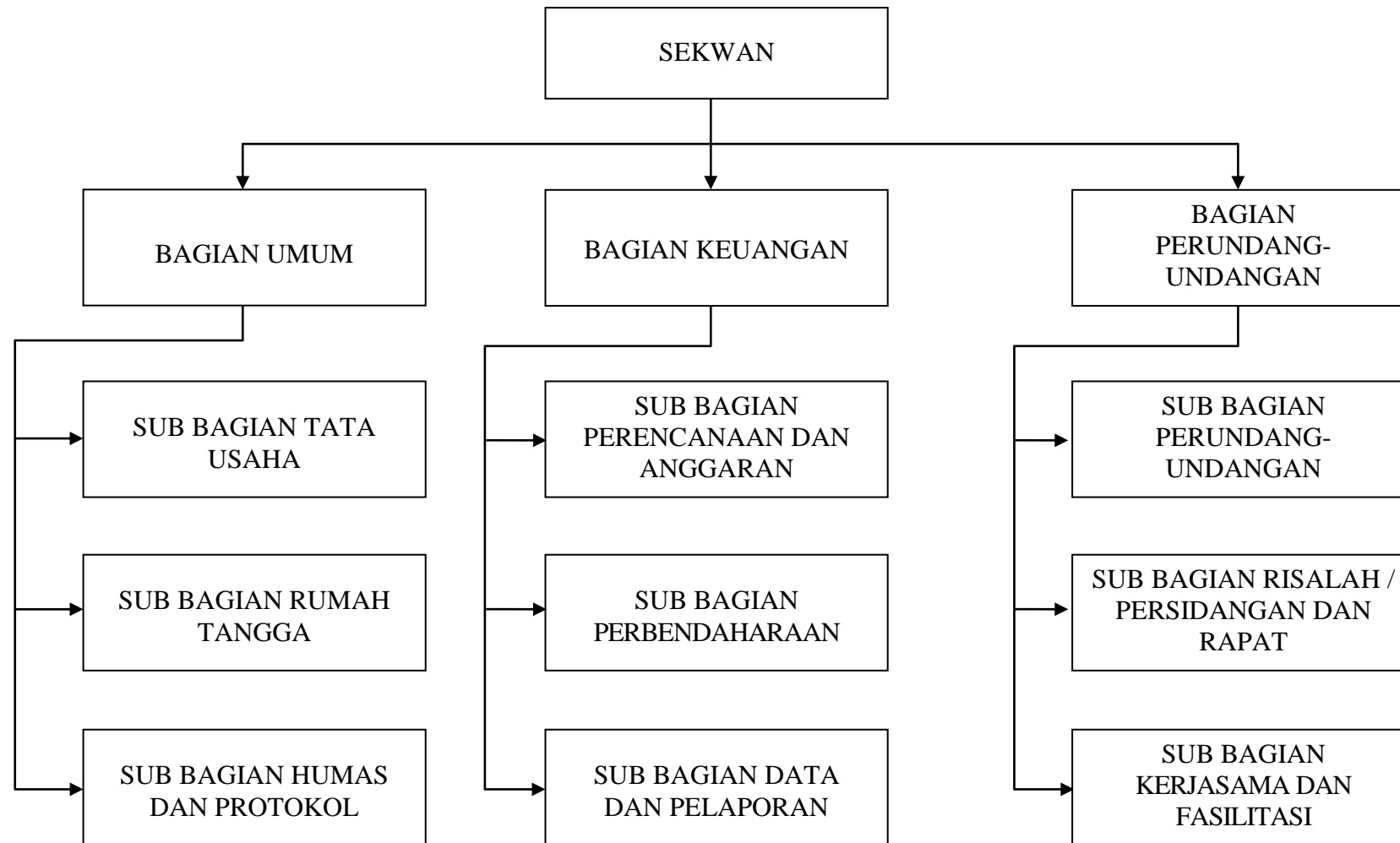
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 DESEMBER 2008.

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR**



1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2015. Capaian Kinerja (*performance results*) 2015 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2015 tolok ukur keberhasilan tahunan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*preformance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi penjelasan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, dan ruang lingkup LAKIP Tahun 2015, isu strategis yang dihadapi, struktur organisasi, dan sistematika penulisan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisikan penjelasan muatan rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar untuk periode 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015, dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja yang membahas 4 (empat) sasaran, dan masing-masing sasaran tersebut, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan terakhir membahas Aspek Keuangan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Rencana Srategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, sebagai suatu angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan agar organisasi tetap eksis.

Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kota Denpasar mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas mampu menjadi perekat komponen jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi Sekretariat DPRD Kota Denpasar disusun berdasarkan Visi Kota Denpasar. Adapun Visi Kota Denpasar adalah :

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, mengingat Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai lembaga pendukung, maka Visi yang ditetapkan adalah:

“TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DEWAN YANG PROFESIONAL DAN KREATIF DALAM Mendukung Efektivitas MAUPUN Produktifitas DEWAN”.

Penjelasan Visi Sekretariat DPRD Kota Denpasar:

Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya sebagai fasilitasi yang mendukung secara optimal dalam peningkatan kinerja DPRD, yang mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan sehingga setiap anggota Dewan merasa puas, senang dan tanpa ada keluhan menerima pelayanan dari Sekretariat DPRD.

2.1.2. Misi

Misi adalah sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kota Denpasar tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya peningkatan fungsi DPRD
2. Mengelola administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja
4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD.

Penjelasan masing masing Misi

a. Mendorong tercapainya peningkatan fungsi DPRD sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi fasilitasi kegiatan DPRD dan fasilitasi yang diberikan diarahkan untuk mendorong DPRD dalam melaksanakan fungsinya secara optimal. Adapun fungsi yang diemban DPRD sebagai berikut:

- 1) Fungsi Legislasi yang diwujudkan dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- 2) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah
- 3) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

b. Selain itu dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya melalui pelayanan administrasi, Adapun pelayanan administrasi berupa: pelayanan administrasi perkantoran serta administrasi keuangan.

c. Menyediakan sarana dan prasarana kerja

Misi ini merupakan upaya Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran kegiatan DPRD melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja seperti misalnya: gedung, meja, kursi, sound system, kendaraan dinas dan sebagainya.

Meskipun kewenangan pengadaan sarana dan prasarana kerja tersebut merupakan kewenangan Walikota, dalam hal ini Bagian Aset, namun Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitas kegiatan DPRD berhak mengusulkan dan mengelola sarana yang diperlukan.

d. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seiring dengan ditetapkannya peraturan yang baru ternyata membawa konsekwensi adanya perubahan tuntutan tugas bagi aparat pelaksana tugas artinya bahwa tuntutan dari peraturan tersebut mengharuskan kita selaku aparatur untuk senantiasa meningkatkan kualitas performance yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM demi tercapainya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD melalui diklat, kursus-kursus/bimtek, seminar dan sebagainya.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, disamping itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tabel 2.1 Misi - Tujuan

Misi	Tujuan		
	Uraian	Indikator tujuan	Target
Mendorong tercapainya peningkatan fungsi DPRD	Meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD	Prosentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Mengelola administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan	Melaksanakan tertib administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan		
Menyediakan sarana dan prasarana kerja	Memperlancar mekanisme kerja		
Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Sekretariat DPRD.		

2. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran Strategis

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran adalah penjabaran dari

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan penyebaran kuesener sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Tabel 2.2. Sasaran Strategis

Sasaran/capaian Program		
Uraian	Indikator	Target
1. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD terhadap Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	1. Prosentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar terhadap layanan Sekretariat DPRD terkait fungsi Legislas, Anggaran dan pengawasan	90 %

3. Cara mencapai tujuan dan sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD

: SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN

: 2015

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
1. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar, dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.	1. Survey kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar	90%	1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1) Pembahasan rancangan peraturan daerah	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan	Rp.	3.698.525.000	
					<u>Output</u> - Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	kali	24	
					<u>Outcome</u> - Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan	buah perda	15	
				2) Rapat rapat alat kelengkapan dewan hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan	Rp.	178.266.000	
					<u>Output</u> - Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	kali	132	
					<u>Outcome</u> - Jumlah keputusan rapat alat-alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan	keputusan	66	
				3) Rapat rapat paripurna/ sosialisasi peraturan daerah	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan	Rp.	967.175.000	
					<u>Output</u> - Terlaksananya rapat-rapat paripurna	kali	14	
					<u>Outcome</u> - Jumlah keputusan paripurna dewan yang ditetapkan	Keputusan	14	
				4) Pelaksanaan Reses	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan	Rp.	1.989.375.000	
					<u>Output</u> - Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengankonstituennya di daerah pemilihan	Kali	3	
					<u>Outcome</u> - Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir	cakupan usulan	5	
				5) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan	Rp.	4.497.438.000	
					<u>Output</u> - Jumlah pimpinan dan anggota DPRD kunjungan kerja	Kali	2	
					<u>Outcome</u>			

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
					- Jumlah laporan hasil kunjungan kerja pimpinan anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	Cakupan laporan	2	
				6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	Rp. kali cakupan laporan	1.759.000.000 3 3	
				7) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang kunjungan kerja	Rp. kali orang	6.063.100.000 24 45	
				8) Penerbitan tabloid aspiratif	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Adanya tabloid aspiratif <u>Outcome</u> - Jumlah tabloid yang memuat aktifitas DPRD	Rp. buah buah	210.075.000 2000 2000	
				9) Kegiatan Fraksi	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kegiatan fraksi <u>Outcome</u> - Jumlah keputusan yang ditetapkan	Rp. cakupan cakupan keputusan	216.082.500 5 5	
				10) Pelaksanaan olah raga	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar <u>Outcome</u> - Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar	Rp. kali orang	46.110.000 1 45	
				11) Pembahasan ranperda inisiatif	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif	Rp. kali	611.325.000 24	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
					<u>Outcome</u> - Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan	buah perda	2	
			2. Peningkatan disiplin aparatur	12) Pengadaan pakaian dinas	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Adanya pakaian dinas DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah anggota DPRD yang meningkat kedisiplinan	Rp. jenis orang	268.500.000 3 45	
			3. Pelayanan administrasi perkantoran	1) Penyediaan jasa jaminan kesehatan DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Tersedianya jasa jaminan asuransi kesehatan dan general chek up <u>Outcome</u> - Terlayannya anggota DPRD	Rp. cakupan cakupan layanan	1.125.000.000 2 2	
				2) Pelayanan administrasi perkantoran	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya layanan administrasi perkantoran <u>Outcome</u> - Terlayannya anggota DPRD	Rp. cakupan Cakupan layanan	2.877.959.000 25 25	
			4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1) Peningkatan sarana dan prasarana	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana <u>Outcome</u> - Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD karena ketersediaan prasarana	Rp. cakupan cakupan prasarana	2.022.595.500 4 4	
				2) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor <u>Outcome</u> - Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD karena ketersediaan peralatan	Rp. cakupan Cakupan peralatan	62.500.000 7 7	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
			5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1) Kursus/ pelatihan Bimbingan teknis PNS	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan. <u>Outcome</u> - Meningkatnya mutu pelayanan terhadap tugas-tugas fungsi DPRD	Rp.	122.006.200	
						kali	1	
						orang	7	

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang ditetapkan.

Penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar disusun mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2010 - 2015. Adapun Penetapan Kinerja tersebut yakni:

Penetapan Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target		Program / Kegiatan	Anggaran
1. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.	- Terlaksanakan pembahaasan rancangan peraturan daerah	24 kali		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 4.456.925.000
	- Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan.	15 buah perda	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
	- Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	132 kali	2	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan hearing/dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	Rp. 216.066.000
	- Jumlah keputusan rapat alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan.	66 keputusan			
	- Terlaksananya rapat-rapat paripurna	14 kali	3	Rapat rapat paripurna/sosialisasi peraturan daerah	Rp. 1.142.920.000

- Jumlah keputusan paripurna Dewan yang ditetapkan.	14 Keputusan			
- Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengan konstituennya di daerah pemilihan	3 kali	4	Pelaksanaan Reses	Rp. 2.459.450.000
- Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir.	3 cakupan usulan			
- Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2 Kali	5	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 5.722.716.000
- Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.	2 cakupan laporan.			
- Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD	3 kali	6	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 1.942.000.000
- Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.	3 cakupan laporan.			
- Terlaksananya kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD	24 kali	7	Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD	Rp. 5.408.900.000
- Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.	24 cakupan laporan.			
- Adanya tabloid aspiratif	2000 buah	8	Penerbitan tabloid aspiratif	-
- Jumlah tabloid yang memuat aktivitas DPRD.	2000 buah			
- Terlaksananya kegiatan fraksi	5 fraksi	9	Kegiatan Fraksi	Rp. 241.282.500
- Jumlah keputusan yang ditetapkan.	5 cakupan keputusan			
- Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar	1 kali	10	Penyelenggaraan olah raga	Rp. 46.110.000
- Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar	1 laporan. partisipasi			
- Terlaksanakanya pembahasan ranperda inisiatif	24 kali	11	Pembahasan ranperda inisiatif DPRD	Rp. 296.125.000
- Jumlah perda yang ditetapkan.	2 buah perda			
- Adanya pakaian dinas DPRD	3 jenis		Program peingkatan disiplin aparaturnya	Rp. 285.450.000
- Jumlah Anggota DPRD yang meningkat disiplinannya.	45 orang	1	Pengadaan pakaian dinas DPRD.	
			Program pelayanan Administrasi	

	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jaminan asuransi kesehatan dan General Check Up - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 2 cakupan pelayanan Sekretariat. - Terlaksananya Layanan administrasi perkantoran - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 25 cakupan layanan Sekretariat. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 cakupan 2 cakupan layanan. 25 cakupan 25 cakupan layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 	<ul style="list-style-type: none"> perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pelayanan administrasi perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 3.196.668.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan dan pemeliharaan sarana - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD.</i> karena ketersediaan 4 cakupan prasarana. - Terpeliharanya perlengkapan dan pemeliharaan kantor - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD</i> karena ketersediaan 7 cakupan peralatan. 	<ul style="list-style-type: none"> 4 cakupan 4 cakupan prasarana 7 cakupan 7 cakupan peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 2.378.520.500 Rp 74.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundang-undangan - Meningkatnya mutu pelayanan 13 orang aparatur terhadap tugas-tugas fungsi DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> 7 orang 7 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Sosialisai Peraturan Perundang Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 59.569.200

2.3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggungjawaban. Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka sistem pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2015 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Prosentase fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Indikator ini membandingkan antara rencana dari Raperda yang dibahas dan ditetapkan dalam Prolegda dan Realisasi pembahasan dan penetapan raperda menjadi Perda pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar indikator tingkat pencapaian yang sudah dibahas maka semakin baik tingkat keberhasilannya. Sumber data yang digunakan adalah laporan catur wulan setiap akhir masa sidang dan tahunan dari Sub Bag Risalah dan Persidangan.

$$\frac{\sum \text{Raperda yang dibahas}}{\sum \text{Raperda yang masuk/ Prolegda}} \times 100\%$$

- 2) Prosentase peningkatan rapat rapat alat kelengkapan dewan, Indikator ini membandingkan antara rencana rapat rapat alat kelengkapan dewan dengan realisasi pelaksanaan pada tahun yang bersangkutan.

$$\frac{\sum \text{Rencana rapat - rapat}}{\sum \text{Realisasi rapat - rapat}} \times 100\%$$

- 3) Prosentase peningkatan pelaksanaan Reses, Indikator ini membandingkan antara rencana pelaksanaan Reses dengan realisasinya pada tahun yang bersangkutan.

$$\frac{\sum \text{Rencana reses}}{\sum \text{Realisasi reses}} \times 100\%$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja secara proporsional. Indikator Kinerja di Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2010-2015 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2010-2015.

Indikator Kinerja diambil dari program dengan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, yang difokuskan pada sasaran :

**Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2015
yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.	- Terlaksanakan pembahaasan rancangan peraturan daerah	24 kali	7.564.337.000	24 kali	100	3.400.450.616	44,95
	- Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan.	15 perda		14 perda			
	- Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	132 kali	219.603.000	132 kali	100	179.644.500	81,80
	- Jumlah keputusan rapat alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan.	66 Kep		56 Kep			
	- Terlaksananya rapat-rapat paripurna	14 kali	1.195.720.000	12 kali	85,71	199.777.930	16,71
	- Jumlah keputusan paripurna Dewan yang ditetapkan.	14 bh Kep		12 bh Kep			
	- Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengan konstituennya di daerah pemilihan	3 kali	2.459.450.000	3 kali	100	2.385.660.000	97
	- Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir.	5 Cak. Usulan		3Cak. Usulan			
- Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	-	-	-	-	-	-	
- Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	-	-	-	-	-	-	
- Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD	4 kali	1.942.000.000	0	0	0	0	
- Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.	4 cakupan laporan.						
- Terlaksananya kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD	24 kali	11.567.820.000	20 kali	95,20	6.160.352.242	53,25	

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
	- Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.	24 cakupan laporan.		24 cakupan laporan			
	- Adanya tabloid aspiratif - Jumlah tabloid yang memuat aktivitas DPRD.	-	-	-	-	-	-
	- Terlaksananya kegiatan fraksi - Jumlah keputusan yang ditetapkan.	5 fraksi 5 cakupan keputusan	241.282.500	5 fraksi 5 Cak. Kep	100	182.280.000	75,55
	- Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar - Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar	1 kali 1 laporan. partisipasi	46.110.000	1 kali 1 laporan. partisipasi	100	44.324.000	96,13
	- Terlaksanakanya pembahasan ranperda inisiatif - Jumlah perda yang ditetapkan.	24 kali 2 buah perda	256.125.000	0	0	0	0
	- Adanya pakaian dinas DPRD - Jumlah Anggota DPRD yang meningkat disiplinannya.	3 jenis 45 orang	285.450.000	3 jenis 45 orang	100	245.378.000	85,96
	- Tersedianya jaminan asuransi kesehatan dan General Check Up - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 2 cakupan pelayanan Sekretariat.	-	-	-	-	-	-
	- Terlaksananya Layanan administrasi perkantoran - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 25 cakupan layanan Sekretariat.	25 cakupan 25 cakupan layanan.	3.283.181.000	25 Cakupan 25 Cakupan	100	2.425.632.339	73,88
	- Pengadaan dan pemeliharaan sarana - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD.</i> karena ketersediaan 4 cakupan prasarana.	4 cakupan 4 cakupan prasarana	3.261.180.500	4 Cakupan 4 Cakupan	100	2.048.697.133	62,82
	- Terpeliharanya perlengkapan dan pemeliharaan kantor - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD</i> karena ketersediaan 7 cakupan peralatan.	7 cakupan 7 cakupan peralatan	91.300.000	5 Cakupan 5 Cakupan	100	48.598.000	53,23
	- Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundang-undangan - Meningkatkan mutu pelayanan 13 orang aparatur terhadap tugas-tugas fungsi DPRD.	1 kali 7 orang	59.569.200	1 kali 7 orang	100	42.727.300	71,73

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama secara proporsional. Indikator Kinerja Utama di Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2010-2015 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2010-2015.

Indikator Kinerja Utama diambil dari program-program utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar, yang difokuskan pada sasaran :

1. Prosentase fasilitas penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Indikator ini membandingkan antara rencana dari Raperda yang sudah ditetapkan dalam Prolegda dan realisasi dari pembahasan raperda yang sudah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja utamanya yakni dari 24 kali pembahasan raperda yang ditargetkan dalam prolegda terealisasi pembahasan sebanyak 24 kali rapat dan 15 Ranperda yang ditargetkan dan terealisasi telah ditetapkan 14 Ranperda menjadi Peraturan Daerah atau sebesar 100 %.

2. Prosentase peningkatan rapat alat kelengkapan dewan.

Indikator ini membandingkan antara rencana pelaksanaan rapat alat kelengkapan dewan dengan realisasi pelaksanaan, pada tahun 2015 capaian indikator kinerja utamanya dengan kategori berhasil yakni dari 132 kali rapat yang direncanakan dan realisasinya sudah 132 kali rapat dan 56 keputusan yang dihasilkan atau 100 % .

3. Prosentase peningkatan pelaksanaan Reses.

Indikator ini membandingkan antara rencana pelaksanaan Reses dengan realisasi pelaksanaan, pada tahun 2015 capaian indikator kinerja utamanya dengan kategori berhasil yakni dari 3 kali Reses yang direncanakan dan realisasinya sudah 3 kali Reses dan 3 cakupan dokumen usulan masyarakat yang dihasilkan atau 100 % .

Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2015 dan target Renstra tahun terakhir, dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Target RENSTRA 2015
1. Peraturan Daerah yang ditetapkan	15 bh	21 bh	15 bh	12 bh	15 bh	9 bh	15 bh	10 bh	15 bh	14 bh	15 bh
2. Keputusan Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan	66 kep	65 kep	66 kep	60 kep	66 kep	72 kep	66 kep	36 kep	66 kep	56 kep	66 Kep
4. Usulan/aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan reses.	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi	3 cakupan usulan aspirasi

Selain pengukuran indikator kinerja utama, pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar **dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015** juga dilakukan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan asli daerah	0	0	0
	2. Dana Perimbangan	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0
B	Belanja			
	1. Belanja tidak langsung DPRD	12.375.837.800	11.319.240.492	91,46%
	2. Belanja tidak langsung Sekretariat	3.759.403.100	3.571.629.299	95%
	3. Belanja langsung	27.099.415.650	24.060.140.437	88,78%
C	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.			
	1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	5.796.912.500	5.675.114.600	97.89
	2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.	74.960.000	69.930.000	93.28
	3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi peraturan daerah.	91.300.000	48.014.000	52.58
	4. Kegiatan reses	2.792.250.000	2.544.615.000	91.13
	5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar negeri.	1.965.280.000	1.832.537.700	93.24
	6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.297.800.000	2.036.781.000	88.64
	7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat - alat kelengkapan Dewan.	6.369.100.000	6.145.691.800	96.49
	8. Penerbitan tabloid aspiratif	80.000.000	76.086.000	95.10
	9. Kegiatan Fraksi	183.277.400	83.180.500	45.38
	10. Penyelenggaraan kegiatan olahraga	22.050.000	22.045.600	99.98
	11 . Pembahasan ranperda inisiatif DPRD	217.195.150	0	0
D	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan jasa j aminan pemeliharaan kesehatan DPRD.	675.000.000	600.000.000	88.88
	2. Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.172.173.390	2.572.719.608	81.10
E	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.791.557.210	1.953.854.229	69.99
	2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	75.000.000	59.643.500	79.52

F	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas DPRD	334.320.000	229.590.000	68,67
G	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.	161.240.000	110.336.900	68,43

**Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2012
yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
Belanja Tidak Langsung						
1. Belanja DPRD	45 org	13.979.637.700	45 org	100	13.674.800.252	97,81
2. Belanja Sekretariat	58 org	4.154.456.400	58 org	100	3.909.602.409	94,10
Belanja Langsung						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.	2 paket	675.000.000	2 paket	100	445.722.500	66,03
1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran	25 paket	2.338.473.300	24 Paket	96	1.599.482.712	68,39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 paket	2.820.571.910	4 paket	100	1.834.388.934	65,03
2.2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	7 paket	40.000.000	7 paket	100	36.451.550	91,12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
3.1. Belanja Pakaian Dinas DPRD	3 paket	229.500.000	3 paket	100	228.492.000	99,56
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.						
4.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	1 paket	124.542.720	1 paket	100	119.301.600	95,79
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.						
5.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	24 kali	8.249.650.000	21 kali	87,50	5.894.081.100	71,44
5.2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.	132 kali	163.040.000	113 kali	85,60	117.863.500	72,29
5.3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi Peraturan Daerah	14 kali	206.300.000	11 kali	78,57	61.288.000	29,70
5.4. Kegiatan reses	3 kali	2.367.000.000	3 kali	100	2.189.295.000	92,49
5.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 paket	3.916.789.000	2 paket	100	3.791.454.800	96,80
5.6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kali	3.635.140.000	4 kali	66,66	2.029.451.500	55,82
5.7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar.	24 kali	11.485.030.000	21 kali	87,50	10.172.112.400	88,56
5.8. Penerbitan tabloid aspiratif	1 paket	79.640.000	0	0	0	0
5.9. Kegiatan Fraksi	5 paket	183.277.400	5 paket	100	169.758.000	92,62
5.10. Penyelenggaraan kegiatan Olahraga	1 kali	32.625.000	1 kali	100	31.220.000	95,69
5.11 Pembahasan ranperda inisiatif DPRD	24 kali	214.550.000	0	0	0	0
Jumlah		54.895.223.430			46.304.766.257	84,35

**Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013
yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja DPRD	45 org	13.987.027.300	45 Orang	100	13.660.619.548	97,67
2 Belanja Sekretariat	58 org	4.445.600.128	58 Orang	100	4.210.662.960	94,72
Belanja Langsung						
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.						
1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	24 kali 15 perda	5.839.630.000	11 kali 9 perda	51,28	3.498.983.300	59,92
1.2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.	132 kali 66 Kep	170.171.000	72 kali 72 Kep	72,73	120.750.000	70,96
1.3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi Peraturan Daerah	14 kali 14 bh Kep	489.285.000	14 kali 14 bh Kep	100	165.791.400	33,88
1.4. Kegiatan reses	3 kali 3 Cak. Usulan	2.169.120.000	3 kali 3 Cak. Usulan	100	1.980.495.000	91,30
1.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar negeri	2 Cak. Kunker 45 org	4.540.188.000	1 Cak. Kunker 45 org	97,87	3.344.442.500	73,66
1.6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3 kali 45 Org	3.408.960.000	3 kali 45 Org	100	2.044.251.300	59,97
1.7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar.	24 kali 45 Org	13.415.600.000	22 kali 45 Org	91,67	8.794.651.075	65,56
1.8. Penerbitan tabloid aspiratif	2.000 bh 2000 bh	79.280.000	0	0	0	0
1.9. Kegiatan Fraksi	5 Cak. Kep 5 Cak. Kep	185.657.500	5 Cak. Kep 5 Cak. Kep	100	161.463.500	86,97
1.10. Penyelenggaraan kegiatan olahraga	1 kali 45 Org	39.510.000	1 kali 45 Org	100	34.281.000	86,77
1.11. Pembahasan ranperda inisiatif DPRD	24 kali rapat 2 bh perda	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
2.1. Belanja Pakaian Dinas DPRD	3 Jenis 45 Org	229.500.000	3 Jenis 45 Org	100	220.275.000	95,98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.	2 Cak. Jaminan 45 Org & Keluarga	675.000.000	2 Cak. Jaminan 45 Org & Keluarga	100	675.000.000	100
3.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran	25 Cakupan 25 Cakupan	2.181.796.600	25 Cakupan 25 Cakupan	100	1337.326.073	61,29

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Cakupan 4 Cakupan	4.021.652.840	4 Cakupan 4 Cakupan	100	2.771.714.685	68,92
4.2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	7 Cakupan 7 Cakupan	45.000.000	5 Cakupan 5 Cakupan	71,43	27.654.500	61,45
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.						
5.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	1 kali 13 orang	302.996.200	1 kali 13 orang	100	126.451.300	41,73
J u m l a h		37.793.347.140			25.303.530.633	

**Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2014
yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja DPRD	45 org	14.360.218.100	45 Orang	100	14.017.072.042	97,61
2 Belanja Sekretariat	58 org	4.681.703.500	58 Orang	100	4.444.260.889	94,93
Belanja Langsung						
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.						
1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	24 kali 15 perda	4.367.543.750	17 kali 10 perda	70,83	2.887.568.950	66,11
1.2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.	132 kali 66 Kep	178.266.000	83 kali 36 Kep	62,87	92.511.500	51,90
1.3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi Peraturan Daerah	14 kali 14 bh Kep	581.850.000	14 kali 14 bh Kep	100	387.868.750	66,66
1.4. Kegiatan reses	3 kali 3 Cak. Usulan	1.989.375.000	2 kali 2 Cak. Usulan	67,67	1.330.020.000	66,86
1.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar negeri	2 Cak. Kunker 45 org	4.450.213.500	2 Cak Kunker 45 Org	100	3.952.315.030	88,81
1.6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4 kali 45 Org	3.481.194.500	3 kali 45 Org	75	1.643.767.396	47,22
1.7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar.	24 kali 45 Org	11.245.190.000	21 kali 45 Org	87,50	7.758.958.098	69
1.8. Penerbitan tabloid aspiratif	2.000 bh 2000 bh	78.355.000	1.200 bh	60	11.400.000	14,55
1.9. Kegiatan Fraksi	5 Cak. Kep 5 Cak. Kep	183.457.500	5 Cak. Kep 5 Cak. Kep	100	157.730.000	85,98
1.10. Penyelenggaraan kegiatan olahraga	1 kali 45 Org	46.110.000	1 kali 45 Org	100	38.881.000	84,32
1.11. Pembahasan ranperda inisiatif DPRD	24 kali rapat	243.425.000		0	0	0

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
	2 bh perda					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
2.1. Belanja Pakaian Dinas DPRD	4 Jenis 45 Org	936.000.000	4 jenis 45 orang	100	764.032.500	81,63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.	2 Cak. Jaminan 45 Org & Keluarga	1.125.000.000	2 Cak. Jaminan 45 Org & Keluarga	100	944.865.000	83,99
3.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran	25 Cakupan 25 Cakupan	2.826.450.700	23 Cakupan 23 Cakupan	92	1.951.938.047	69,06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Cakupan 4 Cakupan	2.622.996.250	3 Cakupan 3 Cakupan	75	1.531.145.916	58,37
4.2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	7 Cakupan 7 Cakupan	70.400.000	7 Cakupan 7 Cakupan	100	56.115.300	79,71
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.						
5.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	1 kali 13 orang	122.006.200	1 kali 11 orang	84,62	91.986.500	75,35
J u m l a h		53.589.755.000			42.062.436.918	

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja DPRD	45 org	17.162.461.600	45 Orang	100	16.518.635.821	96,25
2 Belanja Sekretariat	58 org	4.979.573.300	58 Orang	100	4.805.977.054	96,51
Belanja Langsung						
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.						
1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.	24 kali 15 perda	7.564.337.000	24 kali 14 perda	100	3.400.450.616	44,95
1.2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.	132 kali 66 Kep	219.603.000	132 kali 56 Kep	100	179.644.500	81,80
1.3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi Peraturan Daerah	14 kali 14 bh Kep	1.195.720.000	12 kali 12 bh Kep	85,71	199.777.930	16,71

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
1.4. Kegiatan reses	3 kali 3 Cak. Usulan	2.459.450.000	3 kali 3 Cak. Usulan	100	2.385.660.000	97
1.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar negeri		-			-	
1.6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4 kali 45 Org	1.942.000.000	0	0	0	0
1.7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar.	24 kali 45 Org	11.567.820.000	20 kali 45 Org	95,20	6.160.352.242	53,25
1.8. Penerbitan tabloid aspiratif		-			-	
1.9. Kegiatan Fraksi	5 Cak. Kep 5 Cak. Kep	241.282.500	5 Cak. Kep 5 Cak. Kep	100	182.280.000	75,55
1.10. Penyelenggaraan kegiatan olahraga	1 kali 45 Org	46.110.000	1 kali 45 Org	100	44,324.000	96,13
1.11. Pembahasan ranperda inisiatif DPRD	24 kali rapat 2 bh perda	256.125.000	0	0	0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
2.1. Belanja Pakaian Dinas DPRD	3 Jenis 45 Org	285.450.000	3 jenis 45 orang	100	245.378.000	85,96
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.		-			-	
3.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran	25 Cakupan 25 Cakupan	3.283.181.000	25 Cakupan 25 Cakupan	100	2.425.632.339	73,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Cakupan 4 Cakupan	3.261.180.500	4 Cakupan 4 Cakupan	100	2.048.697.133	62,82
4.2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	7 Cakupan 7 Cakupan	91.300.000	5 Cakupan 5 Cakupan	100	48.598.000	53,23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.						
5.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	1 kali 7 orang	59.569.200	1 kali 7 orang	100	42.727.300	71,73
J u m l a h		54.615.163.100			38.688.134.935	

3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, dengan cara menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan.

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama Tahun 2015 meliputi 4 (empat) sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 17 (tujuh belas) indikator yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Sasaran Meningkatkan kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar, dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan pengawasan.

Dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
1	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1) Pembahasan rancangan peraturan daerah	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah <u>Outcome</u> - Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	- 24 kali 15 buah perda	7.564.337.000 - -	- 24 kali 14 perda	- 100 -	3.400.450.616 - -	- 44,95 -
		2) Rapat rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan <u>Outcome</u> - Jumlah keputusan rapat rapat alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan	- 132 kali 66 keputusan	219.603.000 - -	- 132 kali 56 keputusan	- 100 -	179.644.500 - -	81,80 - -
		3) Rapat rapat paripurna/ sosialisasi peraturan daerah	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya rapat-rapat paripurna <u>Outcome</u> - Jumlah keputusan paripurna Dewan yang ditetapkan	- 14 kali 14 Keputusan	1.195.720.000 - -	12 kali 12 bh Keputusan	85,71 -	199.777.930 - -	16,71 - -
		4) Pelaksanaan Reses	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengan konstituennya di daerah pemilihan	- 3 Kali	2.459.450.000 - -	- 3 kali	- 100	2.385.660.000 - -	- 97

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
			<u>Outcome</u> Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir	3 cakupan usulan		3 cakupan usulan			
		5) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar negeri	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Jumlah pimpinan dan anggota DPRD kunjungan kerja <u>Outcome</u> - Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	-	-	-	-	-	-
		6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	4 kali 3 Cakupan laporan	1.942.000.000	0	0	0	0
		7) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	24 kali 24 Cakupan Laporan	11.567.820.000	20 kali	95,20	6.160.352.242	53,25
		8) Penerbitan tabloid aspiratif	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Adanya tabloid aspiratif <u>Outcome</u> - Jumlah tabloid yang memuat aktivitas DPRD	-	-	-	-	-	-
		9) Kegiatan Fraksi	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan		241.282.500			182.280.000	75,55

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
			<u>Output</u> - Terlaksananya kegiatan fraksi	5 cakupan		5 Cak. Kep	100		
			<u>Outcome</u> - Jumlah keputusan yang ditetapkan	5 cakupan keputusan		5 cakupan keputusan			
		10) Pelaksanaan olah raga	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan		46.110.000			44.324.000	96,13
			<u>Output</u> - Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar	1 kali		1 kali	100		
			<u>Outcome</u> - Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar	1 laporan partisipasi		1 laporan partisipasi			
		11) Pembahasan ranperda inisiatif	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan		256.125.000	0	0	0	0
			<u>Output</u> - Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif	24 kali					
			<u>Outcome</u> - Jumlah perda yang ditetapkan	2 buah perda					

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
2	Peningkatan disiplin aparatur	12) Pengadaan pakaian dinas	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan		285.450.000			245.378.000	85,96
			<u>Output</u> - Adanya pakaian dinas DPRD	3 jenis		3 jenis	100		
			<u>Outcome</u> - Jumlah Anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya	45 orang		45 orang			

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
3	Pelayanan administrasi perkantoran	1) Penyediaan jasa jaminan kesehatan DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan	-	-	-	-	-	-
			<u>Output</u> - Tersedianya jasa jaminan asuransi kesehatan general check-up						
			<u>Outcome</u> - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 2 cakupan pelayanan Sekretariat						
		2) Pelayanan administrasi	<u>Input</u> - Dana yang	-	3.283.181.000	-		2.425.632.339	73,88

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
		perkantoran	diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya layanan administrasi perkantoran <u>Outcome</u> - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 25 cakupan layanan Sekretariat	25 cakupan	-	25 cakupan	100		
				25 cakupan laporan		25 cakupan			

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
4	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1) Peningkatan sarana dan prasarana	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana <u>Outcome</u> - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD.</i> karena ketersediaan 4 cakupan prasarana	-	3.261.180.500	4 cakupan	100	2.048.697.133	62,82
		2) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor <u>Outcome</u> - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD</i> karena ketersediaan 7 cakupan peralatan.	-	91.300.000	7 cakupan	100	48.598.000	53,23
				7 cakupan peralatan	-	5 cakupan peralatan			

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1) Kursus/ pelatihan Bimbingan teknis PNS	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan. <u>Outcome</u> - Meningkatnya mutu pelayanan 13 orang aparatur terhadap tugas-tugas fungsi DPRD	-	59.569.200	1 kali	100	42.727.300	71,73
				13 orang	-	7 orang			

3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data pengukuran pencapaian sasaran "Meningkatnya pelaksanaan tugas fungsi DPRD" melalui 12 (dua belas) indikator .

Adapun indikator tingkat capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah fisik terealisasi 24 kali rapat dari target 24 kali rapat dan Peraturan Daerah yang dibuat dan disahkan sebanyak 14 buah dari target 15 buah Peraturan Daerah jadi secara fisik realisasinya 100 % dan realisasi keuangan untuk perjalanan dinas konsultasi Pansus realisasinya Rp 3.400.450.616,- dari target anggaran Rp. 7.564.337.000 atau 44,95 %. Ini disebabkan karena :

- 1) Rancangan Perda yang masuk ke DPRD sampai awal bulan Desember 2015 hanya 14 buah rancangan.
- 2) Perjalanan dinas untuk konsultasi mencari pembanding berkaitan dengan Perda yang dibahas jadi tidak maksimal sesuai target karena kesibukan tahun Pemilu Kada dan efisiensi.

Solusi :

- Kedepan Badan Legislasi mengupayakan koordinasi yang lebih intensip dengan eksekutif agar Prolegda lebih banyak dibuat.
- Penganggaran perjalanan dinas untuk lebih efektif agar ditentukan lebih awal daerah tujuan yang dikunjungi untuk konsultasi mencari pembanding.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat dari Peraturan Daerah yang dihasilkan adalah sebagai Pedoman Pemerintah Kota Denpasar menjalankan fungsinya untuk mengatur kehidupan masyarakat Kota Denpasar menjadi lebih sejahtera.

2. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama secara fisik terealisasi 132 kali rapat dari target 132 kali rapat dan dihasilkan 56 keputusan dari target 66 keputusan atau 100% dan realisasi keuangan Rp.179.644.500,- dari target Rp. 219.603.000,- atau 81.80%.

Ini disebabkan karena :

- Menjelang tahun Pemilu kada kegiatan/aktivitas rapat/hearing tokoh masyarakat/tokoh agama agak menurun intensitasnya karena dewan disibukkan kegiatan turun langsung ke daerah konstituennya untuk mesima karma.

Solusi:

- Kedepan di tahun-tahun menjelang tahun pemilu dalam penganggaran kita prediksi intensitas kegiatannya agar lebih efektif.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat dari Keputusan rapat alat kelengkapan sebagai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar .

3. Kegiatan rapat – rapat paripurna / sosialisasi peraturan daerah terealisasi 12 kali rapat dari target 14 kali rapat secara fisik realisasinya 85,71% dan keuangan realisasinya Rp 199.777.930 dari target anggaran Rp 1.195.720.000 atau 16,71%. Ini disebabkan karena diundurnya pelaksanaan pemilukada dan berubahnya rencana pelantikan Walikota tidak lagi melalui sidang paripurna DPRD, tetapi dilantik oleh Gubernur secara bersamaan di Provinsi sehingga anggaran tidak terpakai.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat dari Keputusan Rapat Paripurna adalah untuk melegalisir Rancangan Peraturan Perundang – Undangan maupun keputusan DPRD yang telah dibahas sebelumnya melalui alat kelengkapan Dewan

4. Kegiatan pelaksanaan Reses fisik terealisasi 3 kali reses dari target 3 kali reses dan usulan yang dihasilkan sebanyak 3 cakupan dari target 3 cakupan usulan jadi secara fisik realisasinya 100 % dan keuangan realisasinya Rp 2.385.660.000,- dari target anggaran Rp. 2.459.450.000,- atau 97 %

Ini disebabkan karena :

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat usulan dalam Reses yang diakomodir melalui aspirasi masyarakat terkait dengan masalah yang dihadapi di daerahnya masing – masing yang disalurkan melalui DPRD pada saat turun lapangan ketemu dengan konstituennya di daerah pemilihan, sebagai bahan musrenbang.

5. Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar negeri tidak bias terealisasi karena ketentuannya ijin keluar negeri sangat ketat terkait persyaratan yang harus dipenuhi di Kementerian Dalam Negeri

Solusi :

- Anggaran ini dialihkan di Perubahan 2015 untuk kegiatan pembangunan.

6. Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD tidak bias terealisasikan.

Ini disebabkan karena :

- 1) Rencana pelaksanaan bimtek semuanya di luar daerah tetapi ada ketentuan untuk pelaksanaan bimtek harus dilaksanakan di Ibu kota Provinsi masing masing yang diselenggarakan oleh Badan diklat Propinsi bekerja sama dengan Setwan.
- 2) Untuk bimtek diluar daerah mengenai pendalaman tugas tugas tidak sempat dilaksanakan sesuai rencana karena kesibukan pemilu kada.

Solusi :

- Di tahun mendatang pelaksanaan bimtek disesuaikan dengan target, waktu dan materi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
- Anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

7. Kegiatan Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan pisik terealisasi 20 kali kunker dari target 24 kali kunker dengan jumlah 45 orang dari target 45 orang jadi secara pisik realisasinya 95,20 % dan realisasi keuangan untuk perjalanan dinas konsultasi Rp 6.160.352.242,- dari target anggaran Rp. 11.567.820.000,- atau 53,25 %.

Ini disebabkan karena :

- 1) Dalam rencana kunjungan kerja dalam rangka konsultasi untuk peningkatan wawasan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setiap tahunnya belum pernah lebih awal ditentukan tujuan daerah yang dikunjungi, sehingga dalam penganggaran dirancang tujuan daerah Jakarta dengan lama 3 hari. Dalam pelaksanaannya sering yang dikunjungi daerah lebih dekat dengan waktu 3 hari.
- 2) Juga dalam pelaksanaannya tidak maksimal karena kesibukan pemilukada dan menerapkan efisiensi intensitas kunjungannya.

Solusi :

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas diupayakan dibuat lebih efektif dengan lebih awal menentukan tujuan daerah yang dikunjungi dan berapa hari lamanya agar penganggaran lebih efisien.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat kunjungan kerja alat – alat kelengkapan DPRD adalah untuk mencari informasi, masukan terkait materi yang dicari di SKPD luar daerah sebagai bahan pembandingan dalam pembahasan – pembahasan masalah teknis dalam rapat dengan SKPD di daerah.

8. Kegiatan Penerbitan tabloid aspiratif tidak dianggarkan lagi.

1) Masih koordinasi untuk mensinkronisasi formulasi format tampilan tabloid sehingga mencetak belum maksimal, juga honorarium lay out belum terealisasikan.

Solusi :

- Di tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan lagi, karena tampilannya mirip dengan advetorial dewan, yang ada di kegiatan administrasi perkantoran.

9. Kegiatan fraksi terealisasi 5 cakupan keputusan dari target 5 cakupan keputusan secara fisik realisasinya 100 % dan realisasi keuangan Rp. 182.280.000,- dari target anggaran Rp 241.282.500 atau 75,55%.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat dari keputusan fraksi adalah aspirasi politik partai yang disalurkan di lembaga DPRD melalui pandangan umum Fraksi dalam Sidang paripurna Dewan.

10. Kegiatan Olahraga dengan realisasi fisik 1 kali dari target 1 kali atau 100% keuangan realisasinya Rp 44,324.000,- dari target keuangan Rp 46.110.000 atau 96,13 %

Solusi :

- Sisa anggaran yang disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Manfaat kegiatan olah raga adalah sebagai partisipasi DPRD dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Denpasar.

11. Pembahasan Ranperda inisiatif

Pembahasan materi terkait Ranperda inisiatif Dewan belum terealisasi karena Badan Legislasi masih dalam tahap konsultasi mencari masukan dan pembandingan di luar daerah terkait permasalahan yang sesuai di Denpasar.

Solusi :

- Sesuai hasil rapat Pimpinan DPRD, walaupun Perda inisiatip Dewan belum bisa terealisasi , namun di tahun berikutnya tetap diupayakan demikian pula penganggarannya tetap diposting.
- Anggarannya disetorkaan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup untuk masing-masing kegiatan
2. Adanya semangat kerja yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas.

Hambatan/masalah:

1. Jadwal kegiatan DPRD terlalu padat sehingga jadwal kunjungan kerja sering berbenturan dengan kegiatan yang lain.
2. SPJ untuk kegiatan reses sering terlambat sehingga mengganggu kelancaran pencairan dana keperluan berikutnya.

Pemecahan masalah:

1. Badan musyawarah dalam penjadwalan kegiatan per bulannya hendaknya mengacu Rencana Kegiatan Tahunan dan apabila ada kegiatan mendadak dimasukan/ditambahkan pada hari yang tidak padat kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan jadwal kunjungan kerja.
2. Dalam memberikan fasilitasi menyesuaikan jadwal yang sudah disepakati.
3. Sekretariat DPRD selalu menginformasikan tepat waktu penyelesaian SPJ khususnya SPJ pelaksanaan Reses,

Berdasarkan data pengukuran pencapaian sasaran "Meningkatnya mutu pelayanan Sekretariat DPRD" melalui 2 (dua) indikator Adapun indikator tingkat capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dewan sudah selesai dan diganti dengan BPJS.
2. Pelayanan administrasi perkantoran terealisasi 25 cakupan layanan dan 25 laporan layanan dari target 25 cakupan pelayanan dan 25 laporan layanan atau 100% dan keuangan realisasinya Rp 2.425.632.339,- dari target Rp 3.283.181.000 = 73,88 %.

Solusi : sisa anggaran administrasi perkantoran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015

Manfaat Administrasi Perkantoran adalah untuk memperlancar mekanisme kerja lembaga Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran:

1. Tersedianya anggaran di masing-masing kegiatan.
2. Adanya semangat Sekretariat dalam melaksanakan tugas.

Hambatan/masalah:

Pemahaman SDM Aparatur di bidang indikator kinerja yang terukur dan outcam dari masing – masing kegiatan masih kurang.

Pemecahan masalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan SDM aparatur yang ada.
2. Mengikutsertakan kursus-kursus di bidang Akip dan Lakip

Berdasarkan data pengukuran pencapaian sasaran "Mengoptimalnya tugas tugas fungsi DPRD" melalui 2 (dua) indikator.

1. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur fisik terealisasi 4 cakupan peningkatan sarana dari target 4 cakupan peningkatan sarana secara fisik realisasinya 100 % dan realisasi keuangan Rp 2.048.697.133,- dari target anggaran Rp. 3.261.180.500 atau 62,82 %.

Ini disebabkan karena :

- 1) Adanya penghematan pemeliharaan kendaraan seperti suku cadang karena kendaraan jabatan maupun operasional kebanyakan masih baru, kerusakannya jarang.
- 2) Kegiatan kendaraan dinas operasional, komisi maupun sekretariat intensitasnya menurun sehingga penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional tidak maksimal sesuai porsi yang dianggarkan.
- 3) Adanya sisa anggaran akibat penawaran rekanan dibawah pagu anggaran

Solusi :

- Kedepan setelah pemilu kada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan intensitasnya meningkat sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan sehingga berdampak kepada padatnya intensitas operasional komisi maupun kesekretariatan sehingga anggaran akan terserap secara maksimal sesuai kebutuhan.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2015.

2. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor target 7 cakupan peralatan dan 7 laporan pemeliharaan peralatan terealisasi 5 cakupan pemeliharaan atau 100 % dan realisasi keuangan Rp 48.598.000 dari target Rp. 91.300.000 atau 53,23 %

Manfaat sarana dan prasarana serta pemeliharaannya adalah untuk memperlancar mekanisme kerja baik DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran:

1. Tersedianya anggaran yang cukup di masing-masing kegiatan.
2. Tersedianya sarana kerja yang cukup memadai.

Hambatan/masalah:

1. Kurangnya kesadaran di masing-masing sub bagian dalam menyusun laporan barang/jasa/inventaris dari hasil pengadaan atau pembelian secara detail.
2. Kurangnya pemahaman bahwa output belanja secara detail merupakan parameter untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan berkinerja

Pemecahan masalah:

1. Untuk menyusun laporan khususnya laporan bulanan menggunakan system jempit bola ke masing-masing sub bagian.
2. Mengusulkan ke Inspektorat Kota agar mengadakan sosialisasi tentang Akip dan Lakip ke Sekretariat DPRD.

Berdasarkan data pengukuran pencapaian sasaran "Meningkatkan mutu pelayanan " melalui 1 (satu) indikator. Adapun indikator tingkat capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS target sebanyak 1 kali untuk 7 orang realisasi 1 kali untuk 7 orang bimtek atau 100 %. dan keuangan Rp 42.727.300,- dari target Rp 59.569.200 = 71,73 %.

Manfaat dari bimbingan teknis aparatur adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan Sekretariat DPRD.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran:

- 1 Tersedianya anggaran yang cukup
- 2 Adanya semangat yang tinggi dari aparatur Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitasnya.

Hambatan/masalah:

1. Penawaran dari lembaga penyelenggara diklat/bintek terlalu banyak dan biayanya variatif relatif tinggi.

Pemecahan masalah:

- 1 Dalam mengirimkan aparatur untuk mengikuti bintek Sekretariat DPRD selektif utamanya pejabat eselon dan staf teknis.
- 2 Meningkatkan koordinasi antar bagian minimal 1 bulan sekali

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dan realisasi masing-masing kegiatan untuk mewujudkan capaian sasaran dapat dirinci sebagai berikut:

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Alokasi anggaran : Rp. 7.564.337.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.400.450.616,- atau 44,95%
 - Efektivitas kinerja : 100%
2. Rapat rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama
 - Alokasi anggaran : Rp. 219.603.000,-
 - Realisasi : Rp. 179.644.500,- atau 81,80%
 - Efektivitas kinerja : 100 %
3. Rapat rapat paripurna/sosialisasi peraturan daerah
 - Alokasi anggaran : Rp. 1.195.720.000,-
 - Realisasi : Rp. 199.777.930,- atau 16,71%
 - Efektivitas kinerja : 85,71%
4. Pelaksanaan Reses
 - Alokasi anggaran : Rp 2.459.450.000,-
 - Realisasi : Rp. 2.385.660.000,- atau 97 %
 - Efektivitas kinerja : 100 %
5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Alokasi anggaran : -
 - Realisasi : -
 - Efektivitas kinerja : -

6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Alokasi anggaran : Rp. 1.942.000.000,-
 - Realisasi : 0
 - Efektivitas kinerja : 0
7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD
 - Alokasi anggaran : Rp. 11.567.820.000,-
 - Realisasi : Rp. 6.160.352.242 ,- atau 53,25 %
 - Efektivitas kinerja : 95,20%
8. Penerbitan tabloid aspiratif
 - Alokasi anggaran : -
 - Realisasi : -
 - Efektivitas kinerja : -
9. Kegiatan Fraksi
 - Alokasi anggaran : Rp. 241.282.500,-
 - Realisasi : Rp. 182.280.000,- atau 75,55%
 - Efektivitas kinerja : 100%
10. Pelaksanaan olah raga memeriahkan HUT Kota Denpasar
 - Alokasi anggaran : Rp. 46.110.000,-
 - Realisasi : Rp. 44.324.000,- atau 96,13 %
 - Efektivitas kinerja : 100%
11. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD
 - Alokasi anggaran : Rp. 256.125.000,-
 - Realisasi : 0
 - Efektivitas kinerja : 0
12. Pengadaan pakaian dinas:
 - Alokasi dana : Rp. 285.450.000,-
 - Realisasi : Rp. 245.378.000,- atau 85,96%
 - Efektivitas kinerja : 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dewan:
 - Alokasi dana : -
 - Realisasi : -
 - Efektivitas kinerja : -

2. Pelayanan administrasi perkantoran:

Alokasi dana : Rp. 3.283.181.000,-
Realisasi : Rp. 2.425.632.339 atau 73,88 %
Efektivitas kinerja : 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur:

Alokasi dana : Rp. 3.261.180.500,-
Realisasi : Rp. 2.048.697.133,- atau 62,82 %
Efektivitas kinerja : 100 %

2. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor:

Alokasi dana : Rp. 91.300.000,-
Realisasi : Rp. 48.598.000,- atau 53,23 %
Efektivitas kinerja : 100 %

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Alokasi dana : Rp. 59.569.200,-
Realisasi : Rp. 42.727.300,- atau 71,73 %
Efektivitas kinerja : 100 %

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misinya dalam Tahun 2015 telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Dalam memfasilitasi DPRD sering dialami beraneka ragam tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota DPRD dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut adanya SDM yang cakap dan terampil dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dijumpai :

Permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu, misal SDM yang menguasai legal drafting, menguasai peraturan perundangan tentang keuangan dan pengadaan barang/jasa
2. Pemahaman Anggota DPRD tentang pengelolaan administrasi keuangan belum maksimal yang mengakibatkan terlambatnya penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
3. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang undangan dari pusat implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya PP. Permendageri maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang baru.

4.2 Langkah Perbaikan

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (Legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP dan Permendageri tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa)
2. Memberi masukan kepada DPRD tentang mekanisme Pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Intensitas Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tahun 2015, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Instansi dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 9 Pebruari 2016
SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR

IGUSTI RAI SUTA, SH
NIP. 10561231 198102 1 044

